**ABSTRAK**

 Penduduk pendatang merupakan penduduk datang yang berasal dari daerah lain, dan biasanya mereka memiliki tujuan utama dalam melakukan migrasinya ke daerah tujuan, seperti halnya mencari pekerjaan, tempat tinggal, maupun edukasi. Pendatang juga dapat bersifat sebagai komponen konstruktif maupun destruktif bagi daerah yang dituju, seperti peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah, atau bahkan meningkatnya angka kriminalitas dikarenakan banyaknya pengangguran. KTP Elektronik merupakan alat pengawas masyarakat agar dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Dengan dibuatnya laporan akhir ini, bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penertiban kepemilikan KTP Elektronik bagi penduduk pendatang serta solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

 Landasan Normatif yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Landasan Teoretis yang digunakan ialah teori Soekanto (2012) yang berkaitan dengan peranan.

 Laporan akhir ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara terhadap Kepala Dinas dan salah satu Staff yang juga merupakan pembimbing teknis lapangan, serta beberapa masyarakat yang merupakan pengguna pelayanan, serta dokumentasi berupa foto kegiatan yang berada di lokasi magang.

 Upaya penertiban kepemilikan KTP Elektronik nyatanya sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan pengecekan dan pengarahan langsung di tempat bagi penduduk pendatang yang datang ke Dinas, pelayanan keliling ke SMA (Sekolah Menengah Atas) yang ada di Kota dengan tujuan agar sedini mungkin masyarakat yang telah memenuhi syarat umur agar segera memiliki KTP Elektronik, minimal perekaman data biometrik jika blanko telah habis. Dinas juga berinovasi tentang Operasi Yustisi yang dimana melibatkan pihak – pihak lain dalam operasinya, yang sementara sedang diajukan dan dikonsultasikan kepada Sekretaris Daerah.

 Kesimpulannya bahwa penertiban kepemilikan KTP Elektronik memiliki tujuan untuk meminimalisir dampak negatif atas masuknya penduduk pendatang ke Kota Mojokerto. Beberapa saran penulis, dengan segera merumuskan dan meresmikan inovasi operasi yustisi, teknik jemput bola yang ditingkatkan, serta sosialisasi terjadwal yang terus digencarkan.

Kata Kunci: Penduduk Pendatang, KTP Elektronik, Operasi Yustisi

***ABSTRACT***

*Outlanders are newcomers that came from the other region, and usually they had their primary objectives in their migration to the destination region, as well as a job hunter, looking for a housing, nor for the education.*

*Outlanders could be tend as a constructive components even destructive for the destination region, just like uplift the labor numbers and regional incomes, or maybe increased crime numbers because of too much unemployent peoples. Electronic ID Card is a tool to observe citizens for minimalize unexpected incident. The purposes of this Final Reports to finds out the resistor factors in disciplining the ownerships of The Electronic ID Card for the Outlanders, and the precise solutions for resolve that matters.*

 *Applied normative base regulations is Undang – Undang 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan and Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Applied theoretical is from Soekanto (2012) that related to roles.*

 *This Final Reports using descriptive research methods with inductive approach methods. Data gathers collected by observation, interview with the Departments Chief, and one of the Staff that was my technical field mentor, and a few citizens that is service users, and the documentation formed in activity photos occurs in the apprenticeship location.*

 *Disciplining efforts the ownerships of the Electronic ID Card actually was executed before by Population and Civil Registry Departments with directly checking and briefing on spot for the outlanders that comes to the Departments, conducting surroundings services to the Senior High School in City with purpose for the qualified citizens on age spesification to early access of ownerships of The Electronic ID Card, with minimum requirements is records the biometrics data if the blank or form is out of stock. The Departments is also inovating about the Yustisi Operations that involved many parties in their operations, which temporarily submitted and consulted to the Regional Secretary.*

 *The conclusion that is disciplining the ownerships of The Electronic ID Card had the purposes to minimalize the negative effects from the coming of the Outlanders to the Mojokerto City. A few suggestion from the writer, as soon as possible to formulate and makes a state the Yustisi Operations inovation, improvements “ball” pick-up technique, also scheduled socialization assignment that to be intensified.*

*Keywords: Outlanders, Electronic ID Card, Yustisi Operations*